



ISTIMEWA

RAMAH TAMAH: Calon Gubernur Kalbar nomor urut 1, Sutarmidji foto bersama Anggota DPRD Kalbar Rasmidi dan keluarga, saat menghadiri malam ramah tamah, Senin (30/9).

Midji Yakin Jalan di Ketapang dan KKU Tuntas

Hadiri Ramah Tamah Anggota DPRD Kalbar Rasmidi

PONTIANAK - Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) nomor urut 1, Sutarmidji mengungkapkan bahwa alokasi anggaran terbesar untuk pembangunan jalan, dan jembatan selama dirinya menjabat

gubernur periode 2018-2023 ada di Kabupaten Ketapang. Hal tersebut disampaikan Midji-sapaan karibnya, saat menghadiri malam ramah tamah

◆ Ke Halaman 7 kolom 1



Sambungan dari halaman 1

Anggota DPRD Kalbar, Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang-Kayong Utara (Kalbar 8), Rasmidi, usai dilantik untuk masa jabatan 2024-2029, Senin (30/9) malam.

Namun salah satu ruas jalan yang masih perlu dibangun dengan anggaran yang cukup besar menurutnya adalah jalan Ketapang-Kendawangan. Yang sebelumnya ruas jalan tersebut sempat diambil alih oleh pemerintah pusat lewat Inpres Jalan Daerah (IJD). Dimana sejak 2023 sudah ditangani sepanjang 20 kilometer. Akan tetapi untuk sisanya yang akan ditangani secara bertahap pada Tahun Anggaran (TA) 2024, sampai saat ini belum direalisasikan oleh pemerintah pusat.

"Jalan Kendawangan itu, waktu itu diminta oleh DPR RI lewat Inpres jalan (IJD), kita (Pemprov) usulkan, dan sudah disetujui, sehingga APBD tidak mengganggu lagi, agar tidak tumpang tindih anggaran. Tahu-tahu (TA 2024) duitnya tidak turun. Jadi masalah sampai sekarang, harusnya kalau memang duitnya tidak ada, biar dibiayai dari APBD saja, kan gitu," ungkapnya.

Sementara untuk di Kabupaten Kayong Utara (KKU), Midji menjelaskan, pembangunan ruas jalan provinsi sudah hampir tuntas. Untuk ruas jalan Sukadana-Melano misalnya saat ini sudah dalam kondisi mantap. Sementara ruas jalan Melano-Teluk Batang, sebagian memang masih mengalami kerusakan. "Jalan itu (Melano-Teluk Batang awalnya) tidak sampai rusak seperti itu, tapi karena muatan (kendaraan yang melintas) sampai lebih dari 12 ton, ya hancur juga jalannya, karena jalan kita maksimal hanya bisa dilalui kendaraan delapan ton," terangnya.

Midji menambahkan, memang alokasi APBD Kalbar selama lima tahun ia menjabat gubernur, untuk pembangunan jalan, dan jembatan terbesar ada di Kabupaten Ketapang. Dari data resume pembangunan jalan, dan jembatan provinsi bidang Bina Marga

tahun 2019-2024, tiga daerah dengan persentase terbesar dari total anggaran adalah Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, dan Sintang. Untuk Kabupaten Ketapang dana yang dikucurkan sebesar 15 persen atau mencapai Rp305 miliar lebih. Sementara Kabupaten Kubu Raya sebesar 13,02 persen atau mencapai Rp249 miliar lebih. Lalu untuk Kabupaten Sintang sebesar 12,31 persen atau mencapai Rp235 miliar lebih.

"Makanya Ketapang itu di (ruas) Tanjung-Marau-Air Upas sampai ke Manis Mata itu (jalan) relatif sudah bagus. Insya Allah di sini saya menyampaikan saja, kalau saya jadi gubernur lagi, jalan itu, jalan provinsi saya yakin bisa tuntas 100 persen," ujarnya.

Midji bisa memastikan hal tersebut karena sudah menghitung dengan data yang valid. Di awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur tahun 2018 lalu, dari total 1.534 kilometer total panjang jalan provinsi, yang kondisinya mantap baru sebesar 49,98 persen. Selama lima tahun, meski sempat menghadapi pandemi Covid-19, selama dua tahun banyak anggaran dipangkas, serta digunakan untuk penanganan Covid-19, progres pembangunan infrastruktur jalan masih cukup baik.

Hasilnya, di akhir masa jabatannya pada 2023 lalu, jalan provinsi dengan kondisi mantap bisa ditingkatkan menjadi sekitar 80 persen. "Artinya dengan kondisi tidak normal, (ada pandemi) Covid-19 kita (Pemprov) bisa menambah hampir 30 persen kondisi mantap. Apalagi dalam kondisi normal, yang sisa 20 persen itu, Insyallah selesai. Yakin saya selesai," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Midji juga mengapresiasi peran anggota DPRD dalam percepatan pembangunan desa mandiri sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Itu karena, dalam program tersebut, salah satunya ada peran anggota DPRD lewat pokok-pokok pikiran (pokir) yang ada. "Peran dewan (anggota DPRD) tanpa diketahui de-

wan ini peran besar, kenapa DPRD itu kan ada yang namanya pokir, pokir mereka itu harus nyantel pada 52 indikator desa mandiri. Saya bilang kalau tidak ada kaitan sama itu (desa mandiri) tidak usah dicairkan, akhirnya desa itu bisa cepat (dibangun)," papernya.

Terbukti, dari total 2.045 desa se-Kalbar, di awal pemerintahannya tahun 2018, baru adasatu desa mandiri. Yang kemudian bisa ditingkatkan hingga mencapai 1.029 desamandiri selama lima tahun. Di samping itu, kini Kalbar pun sudah tidak memiliki desasangat tertinggal, dan desa tertinggal lagi.

"Kalbar itu sudah tidak ada desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal, yang ada sekarang desa berkembang, maju, dan mandiri. Kalau persentase desa mandiri dalam satu provinsi, Kalbar terbesar sudah 52 persen. Itu yang bisa kita lakukan, walaupun (awalnya) dewan tidak tahu, kenapa saya minta pokir itu harus ada kaitan dengan variabel desa mandiri yang 52 itu, akhirnya hasilnya bagus," jelasnya.

Midji lantas mengucapkan selamat kepada Rasmidi yang kembali dilantik menjadi anggota DPRD Kalbar untuk masa jabatan 2024-2029. Ia yakin politisi partai Demokrat itu akan bisa menjalankan tugas, dan mengemban amanah dengan baik. Sehingga bisa bersama-sama dalam memajukan Kalbar. "Mungkin untuk dewan-dewan yang lain juga, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman Demokrat, dan keluarga besar Demokrat, ke depan yang menjadi perhatian (Midji-Didi) itu rumah tidak layak huni, sanitasi yang sehat, dan air bersih. Kalau itu semua sudah tuntas, maka Kalbar akan bisa maju dengan pesat," pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar Rasmidi dari Dapil Ketapang dan Kayong Utara (Kalbar 8) mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Kalbar periode 2018-2023, Sutarmidji. Rasmidi menilai, selama kepemimpinan Sutarmidji, percepatan pembangunan di dua kabupaten tersebut

sangat terasa. Terutama dalam bidang infrastruktur, dan pendidikan.

Dia pun memastikan penilaian yang diberikannya itu secara objektif, bukan pernyataan klise. "Pada masa kepemimpinan Pak Midji sebagai Gubernur Kalbar yang lalu memang konsen dengan infrastruktur. Infrastruktur jalan yang tadinya belum mantap, menjadi mantap," ujarnya.



Di Ketapang sendiri, dikatakan dia, setidaknya ada beberapa ruas jalan provinsi yang dibangun selama kepemimpinan Sutarmidji, meliputi Jalan Batas Kota Ketapang-Pesaguan, Tumbang Titi-Tanjung, Tanjung-Marau, Marau-Air Upas, Air Upas-Manis Mata, dan Sim-pang Sei Gantang-Teluk Batu dengan total panjang 220,25 kilometer. "Selama beliau menjabat, anggaran sebesar Rp305 miliar lebih telah dikucurkan untuk pembangunan jalan di Ketapang. Walaupun kita tahu, Kalbar turut merasakan dampak dari (pandemi) Covid-19 beberapa tahun. Tapi itulah faktanya," ujar Rasmidi.

Sementara itu, di Kabupaten Kayong Utara, Sutarmidji juga membangun infrastruktur jalan sepanjang 68 kilometer, dengan total dua ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar. Diantaranya adalah Siduk-Sukadana, dan Sukadana-Teluk Batang. Dimana total anggaran yang telah dikeluarkan selama periode 2019-2024 mencapai Rp168 miliar lebih. "Karena memang target beliau itu kan infrastruktur. Hanya memang kita (Kalbar) juga merasakan dampak daripada Covid-19 saat itu," kata Rasmidi.

Rasmidi mengakui, bahwa anggaran yang dialokasikan memang belum mencukupi untuk menyelesaikan pembangunan jalan hingga 100 persen. Namun, menurutnya, pemerintah di bawah kepemimpinan Sutarmidji telah melakukan pemetaan pembangunan dengan sangat baik. "Memang ini karena keterbatasan anggaran, jadi tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan, dan tidak memang langsung jadi. Tapi kita sudah melihat

komitmen beliau untuk pemerataan, dan percepatan pembangunan, terutama di bidang infrastruktur," kata dia.

Tak hanya fokus membangun infrastruktur, Sutarmidji juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap pendidikan. Program pendidikan gratis bagi pelajar SMA, SMK, dan SLB Negeri, yang awalnya diragukan banyak pihak, kini telah terbukti manfaatnya. "Itu salah satu janji beliau saat maju sebagai gubernur di periode pertama, dan telah terealisasi. Program pendidikan gratis ini bukan sekadar janji, dan sekarang sudah

dinikmati masyarakat," kata dia.

Di dapil Rasmidi sendiri setidaknya ada lima sekolah baru yang dibangun Sutarmidji. Dengan rincian tiga sekolah di Ketapang, dan dua sekolah di Kayong Utara. Belum lagi rehabilitasi sekolah-sekolah yang menjadi tanggung jawab Pemprov.

Selain infrastruktur, dan pendidikan, program lain yang sangat diapresiasi Rasmidi adalah menciptakan desa mandiri untuk mengentaskan desa sangat tertinggal. Program tersebut disinergikan dengan pokok pikiran anggota dewan un-

tuk menyentuh 52 indikator desa mandiri. "Itu semua untuk mengentaskan desa sangat tertinggal, dan sekarang sudah banyak desa mandiri," katanya.

Karena itu Rasmidi yakin, jika Sutarmidji kembali mendapatkan mandat dari rakyat, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah Kalbar 8, akan tuntas. "Sehingga tidak benar kalau beliau disebut Gubernur Pontianak. Tapi Pontianak memang perlu (dibangun), karena menjadi wajahnya Kalbar. Ketika orang masuk itu yang dilihat dari Kalbar itu Pontianak dulu," pungkasnya. (bar)